



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik : temanggunginspektoreti@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017. LKjIP Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Temanggung, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Pemerintah Kabupaten Temanggung
INSPEKTORAT

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Januari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Fungsi Strategis Inspektorat.....	6
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat.....	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama.....	13
C. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja.....	17
B. Capaian Kinerja.....	18
C. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV : PENUTUP.....	35
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat.....	35
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	36

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

LAMPIRAN II

Laporan keuangan Tahun 2017

LAMPIRAN III

Laporan evaluasi RKPD s.d triwulan IV tahun 2017

LAMPIRAN IV

1. Opini WTP atas laporan keuangan Tahun 2016;
2. Kapabilitas APIP Level 2;
3. QA BPKP atas pelaksanaan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung;



. DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	2
Tabel 1.2	2
Tabel 1.3	3
Tabel 1.4	4
Tabel 1.5	5
Tabel 1.6	5
Tabel 2.1.....	14
Tabel 2.2.....	15
Tabel 3.1	19
Tabel 3.2	21
Tabel 3.3	22
Tabel 3.4	30
Tabel 3.5	31
Tabel 3.6	31
Tabel 3.7	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	26
Gambar 3.2.....	27
Gambar 3.3.....	28
Gambar 3.4.....	29
Gambar 3.5.....	29
Gambar 3.6.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
2. perencanaan program pengawasan;
3. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
4. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
6. penyelenggaraan kegiatan konsultasi (consulting) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
8. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	SD	1 orang
2.	SMP	1 orang
3.	SMA	5 orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	4 orang
5.	S-1 dan D- IV	9 orang
6.	S-2	12 orang
	Jumlah	32 orang

Tabel 1.2
Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2017

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan I	1 orang
2.	Golongan II	9 orang
3.	Golongan III	14 orang
4.	Golongan IV	8 orang
	Jumlah	32 orang



Tabel 1.3
Data PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2017

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Inspektur / Eselon II	1 orang
2.	Sekretaris / Eselon III	1 orang
3.	Sekretaris / Eselon III	4 orang
4.	Kasubag / Eselon IV	3 orang
5.	Jabatan Fungsional Auditor	9 orang
6.	Pengawas Kepatuhan Transaksi Keuangan	3 orang
7.	Pengelola data Pemeriksaan Bukti Permulaan	2 orang
8.	Pengelola Keuangan	1 orang
9.	Pengelola Barang Milik Daerah	1 orang
10.	Bendahara	1 orang
11.	Pengelola Kepegawaian	1 orang
12.	Pengadministrasi Umum	2 orang
13.	Pengemudi	1 orang
14.	Analisis Evaluasi Audit	1 orang
15.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1 orang
	Jumlah	32 orang



Tabel 1.4
Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Laki-laki	17 orang
2.	Perempuan	15 orang
	Jumlah	32 orang

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi. Berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Temanggung jumlah auditor seharusnya kurang lebih 40 s/d 50 orang sedangkan untuk saat ini jumlah auditor baru 9 orang. Pada Tahun 2017 jumlah personil yang ikut dalam tugas pemeriksaan bertambah 6 (enam) dengan rincian 1 (satu) orang calon auditor 2 (dua) orang dari staf sekretariat mengikuti *inpasing*, 2 (dua) orang dari staf sekretariat (*persiapan inpasing*) diperbantukan dalam tugas pemeriksaan dan 1 (satu) orang mutasi masuk dari BPPKAD Kabupaten Temanggung.

Namun demikian jika dilihat dari sisi kualitas berdasarkan tingkat pendidikan formal maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 37,5% personil di Inspektorat telah berpendidikan S2.

Disisi lain kualitas SDM pengawasan juga bisa berarti belum memadai jika dilihat dari pemenuhan pendidikan teknis dan substantif, karena dengan semakin berkembangnya permasalahan, maka masih banyak diklat teknis maupun substantif yang harus dilaksanakan.



Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung mengalami perkembangan sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2016

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	13	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran	253	buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	2	set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	178	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	16	buah	Rusak

Tabel 1.6
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran	253	buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	7	set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	186	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	16	buah	Rusak



Dari tabel sarana dan prasarana tersebut diatas pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat kendaraan dinas roda 4 (empat) dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, meja dan kursi tamu untuk peralatan gedung kantor diantaranya komputer dan printer masih dirasa kurang mencukupi dibanding dengan jumlah personil yang ada. Ketersediaan gedung Gedung Inspektorat saat ini terlalu sempit, sangat tidak memadai dan dirasakan kurang menunjang kinerja Inspektorat sehingga perlu direhab atau dibangun gedung yang baru yang lebih luas.

B. Fungsi Strategis Inspektorat

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang Jujur dan Bersih dari Praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”**.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Laporan Keuangan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun depan dapat mempertahankan opini WTP tersebut.

Disamping itu terdapat pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan adanya perubahan Paradigma peran APIP sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 003 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 yaitu :



B.1 Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :
 - Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - Aspek Pengelolaan Barang Daerah.
 - b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.
 - c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
 - d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Reviu atas Laporan Keuangan;
 3. Monitoring dan Evaluasi;
 4. Sosialisasi dan Asistensi;
 5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
 7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Gelar Pengawasan.



B.2 Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. PMPRB online;
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
7. Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan;
8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa

B.3 Kegiatan Penunjang

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat

Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten



Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten;
3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
4. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
5. Peningkatan Kapabilitas APIP;
6. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat laporan keuangan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung lima tahun kedepan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Masih lemahnya SPIP di OPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum



diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- a. pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- b. pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
 - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai *conceling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

4. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi



quality assurance. Hal ini disebabkan banyaknya mandat yang tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada.

5. Peningkatan Kapabilitas APIP

Target Nasional bahwa Kapabilitas APIP di Indonesia pada level 3 di Tahun 2019 menjadi tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2017 dilaksanakan penilaian peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung, dari hasil semula Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung masih di Level 1 (satu) sampai dengan akhir tahun 2017 hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan level 3 (tiga) dengan catatan.

Masih diperlukan usaha keras untuk mewujudkan Kapabilitas APIP level 3 karena diwajibkan atas pelaksanaan audit kinerja dalam pengawasan dan pelaksanaan indikator-indikator pendukungnya.

6. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung

Masih lemahnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun demikian pada tahun 2017 telah dilaksanakan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, dari nilai semula 2,085 menjadi 3.045 menunggu validasi dari BPKP pusat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu:

**“MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
YANG EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
DI KABUPATEN TEMANGGUNG”**

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengawasan Internal yang Efektif dan Berkesinambungan

Selama ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OPD/unit kerja yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan sistem pengawasan yang efektif dan berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



Dengan melakukan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawas

Peningkatan profesionalisme aparat pengawas perlu didukung dengan adanya pengembangan kapasitas pengawas yang terletak bukan hanya pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas.

Untuk meningkatkan kuantitas aparat pengawas maka diperlukan penyusunan formasi kebutuhan aparat yang dihitung berdasarkan beban kerja yang dimiliki, sedangkan untuk peningkatan kualitas aparat pengawas dilakukan bimbingan teknis, *workshop* dan pelatihan dikantor sendiri (PKS).

3. Membangun Sinergi antar APIP dan Instansi Terkait Lainnya

Sinergitas ini diperlukan dalam rangka mengeliminir pemeriksaan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan kesan bertubi-tubi pada OPD yang sama. Sinergi ini dapat diimplementasikan melalui sinkronisasi Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), peningkatan koordinasi pengawasan, dan kerjasama pengawasan dengan *joint audit*.

4. Memantapkan Peran dan Fungsi Inspektorat yang Berorientasi pada Hasil

Inspektorat sebagai unit kerja yang mempunyai peran dan fungsi pengawasan, sangat strategis dalam menciptakan perbaikan terhadap lingkungan operasional dan administrasi pemerintahan. Selain itu APIP dapat memberikan aktifitas konsultasi.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2017	Rumus
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	80%	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan seluruhnya kali 100 %

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp1.545.223.000,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2017 sebagai berikut:



Tabel 2.2
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.000.000	Sumber Dana APBD
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.500.000	Sumber Dana APBD
c.	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000	Sumber Dana APBD
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000	Sumber Dana APBD
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000	Sumber Dana APBD
f.	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000	Sumber Dana APBD
g.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	Sumber Dana APBD
h.	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	Sumber Dana APBD
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60.000.000	Sumber Dana APBD
j.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.500.000	Sumber Dana APBD
k.	Jasa pelayanan perkantoran	13.200.000	Sumber Dana APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000	Sumber Dana APBD
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.320.000	Sumber Dana APBD
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.338.000	Sumber Dana APBD



3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	450.000.000	Sumber Dana APBD
b. Pengelolaan LP2P, HKSAN dan LHKPN	24.840.000	Sumber Dana APBD
c. Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	50.604.000	Sumber Dana APBD
d. Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tidak Lanjut	39.886.000	Sumber Dana APBD
e. Pengolahan data Simwasda	11.686.000	Sumber Dana APBD
f. Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	136.997.000	Sumber Dana APBD
g. Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	64.916.000	Sumber Dana APBD
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	17.848.000	Sumber Dana APBD
b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17.628.000	Sumber Dana APBD
c. Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	67.460.000	Sumber Dana APBD
d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	130.000.000	Sumber Dana APBD
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	250.000.000	Sumber Dana APBD
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	Sumber Dana APBD
Jumlah seluruhnya	1.545.223.000	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan amanah dari Bupati Temanggung. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana



tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2017. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2017, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran I.

B. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian \geq 100,00%	Memuaskan
2	85,00% \leq capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% \leq capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % \leq capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian \leq 55,00 %	Kurang

Pada tahun 2017 Inspektorat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Rencana Strategis Inspektorat, setidaknya terdapat 4 (empat) tujuan dan sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang professional dan kompeten.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas
 - b. Meningkatnya jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan.
 - c. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan
2. Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.

Sasaran yang akan dicapai :



- a. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala
 - b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.
 - c. Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif
 - d. Terselenggaranya pengawasan tematik
 - e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan public
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP lainnya.
- Sasaran yang akan dicapai :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya.
 - b. Meningkatnya sinergi antar APIP.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi.
- Sasaran yang akan dicapai :
- a. Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD
 - b. Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif
 - c. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - d. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - e. Terselenggaranya zona integritas



Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA (2014-2018)	STANDAR NASIONAL (Jika ada)	TARGET 2017	REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)				REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D 2016 (%)		KET
						2014	2015	2016	2017	DIBANDING TANG TET RENSTRA	DIBANDING STANDAR NASIONAL	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	85 %	---	80 %	71,71	72,11	97,12	100	125	---	

Capaian indikator Inspektorat Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target bahkan melebihi target yang sudah direncanakan dalam Renstra. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis tersebut diukur berdasarkan Rumus Indikator Kinerja Daerah yaitu jumlah penanganan temuan dibagi jumlah temuan x 100 yang mana pengawasan dilakukan terhadap entitas setiap tahunnya. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 125 %, capaian indikator tersebut diukur berdasarkan realisasi sejumlah 884 temuan dengan rekomendasi sejumlah 890 rekomendasi sudah ditindaklanjuti sejumlah 890 rekomendasi dengan selesai 542 rekomendasi dan dalam proses sejumlah 348 rekomendasi, ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 %.



Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2017

6	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan			
	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terselenggaranya kegiatan program Kerja Pengawasan Tahunan	135	177	131
	b. Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN	6.000	6.000	100
	c. Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya kegiatan Bintek dan pembentukan Satgas SPIP	8	8	100
	d. Pelaksanaan LAR WASDA/ penyelesaian tindak lanjut	Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ penyelesaian tindak lanjut	625	747	120
	e. Pengadaan, Pengolahan SIMWASDA dan Unit Pengendalian Resiko	Terselenggaranya pengadaan Simwasda dan tersedianya data pengawasan yang akurat dan akuntabel	12	12	100
	f. Peningkatan sumber daya aparatur pengawas	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, sosialisasi dan pelatihan	4	4	100
	g. Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA	Tersele nggara nya peni laian angka kredit dan Sertifika si JFA	11	9	82



	2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				
	a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	16	20	125
	b.	Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan pendampingan Review Laporan Keuangan, review RKA dan Evaluasi Lakip	8	31	388
	c.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan koordinasi pengawasan	Tersedianya dokumen obyek pemeriksaan dan koordinasi pengawasan antar APIP	10 dan 4	15 dan 4	150/ 100
	d.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48	40	100
	3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase anggaran Penatasahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1(satu) tahun			
	a.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	12	12	100
	b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12	12	100
	c.	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan ATK	12	12	100
	d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	100
	e.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik /bangunan kantor	12	12	100
	f.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	100
	g.	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12	12	100



		h. Penyediaan makan an dan minuman	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	12	12	100
		i. Rapat – rapat koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya konsultasi & koord ke BPKP & Inspekto rat prov	12	12	100
		j. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersele nggaranya koor dinasi dan penyelesaian tugas	12	12	100
		k. Jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam dinas	12	12	100
		4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Gedung kantor	3	3	100
		b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung kantor	12	12	100
		c. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor	12	12	100
		5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan (Ren ja , PK, Lakip, LPPD, Data base pelaporan)	5	7	140
		6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
		a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	Terselenggarakannya pelayanan publik bebas dari pungli	12	12	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya jasa servis kendaraan dinas, penggantian suku cadang, BBM dan STNK dengan target dan realisasi 12 bulan;
 - b) Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan alat kebersihan dengan target dan realisasi 12 bulan;



- c) Penyediaan alat tulis kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target dan realisasi 12 bulan;
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan capaian kinerja tersedianya barang cetakan, foto copy dan penggandaan dengan target dan realisasi 12 bulan;
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan instalasi listrik dengan target dan realisasi 12 bulan;
 - f) Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor berupa prasman set untuk sarana jamuan tamu dengan target dan realisasi 12 bulan;
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, dengan capaian kinerja tersedianya referensi bahan bacaan dan perundang-undangan dengan target dan realisasi 12 bulan;
 - h) Penyediaan makanan dan minuman, tersedianya kebutuhan makan minum pegawai, rapat dan tamu dengan target dan realisasi 12 bulan.
 - i) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar APIP dan tugas pengawasan dengan target dan realisasi 12 bulan.
 - j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dengan OPD/obyek pemeriksaan di Kabupaten Temanggung dengan target dan realisasi 12 bulan.
 - k) Jasa Pelayanan Perkantoran, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya uang lembur untuk pekerjaan diluar jam dinas dengan target dan realisasi 12 bulan.
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, capaian kinerja berupa tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor berupa 2 unit AC, 1 struktur organisasi, 1 papan kegiatan inspektur, 20 kursi rapat, 1 set meja kursi tamu dan 1 unit proyektor;
 - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, capaian kinerja berupa tersedianya 1 unit Scaner untuk menunjang pengiriman data secara on line;
 - c) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya printer, laptop dan komputer sehingga dapat menunjang kelancaran kerja.
- 3). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi kegiatan :
- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeriksaan rutin di Desa, Sekolah dasar dan



Organisasi Perangkat Daerah dengan hasil tersedianya laporan hasil pengawasan dengan realisasi 185 LHP dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan;

- b) Pengelolaan LP2P dan LHKPN, dengan capaian kinerja berupa terpantaunya pelaporan LHKPN dan LP2P untuk PNS dengan cetak blangko LP2P untuk PNS dan pejabat Golongan III dengan target dan realisasi 6.000 lembar.
- c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, capaian kinerja berupa tersedianya dokumen Rencana Tindak Pengendalian OPD dengan realisasi terlaksananya bimtek dan pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah 8 OPD dan terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelaksanaan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung dari BPKP dengan hasil kenaikan Skor semula 2,28 menjadi 3,045 menunggu Validasi dari BPKP Pusat;

Foto 3.1

Pelaksanaan Bimtek dan Pendampingan Penyusunan RTP



- d) Pelaksanaan Larwasda/Penyelesaian Tindak Lanjut, dengan capaian kinerja berupa tersedianya data hasil tindak lanjut pengawasan dengan target 884 temuan dengan rekomendasi sejumlah 890. Sudah ditindaklanjuti sejumlah 890 rekomendasi dengan selesai 542 dan dalam proses sejumlah 348 rekomendasi;
- e) Pengolahan Data Simwasda, dengan capaian kinerja berupa tersedianya data pengawasan yang akurat dan akuntabel dengan target dan realisasi 12 bulan;
- f) Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas, capaian kinerja berupa :
 - meningkatnya pengetahuan personil Inspektorat Kabupaten Temanggung melalui Bimtek penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung, Bimtek Audit Kinerja, Bimtek Audit Investigasi dan Bimtek peningkatan Kapabilitas APIP.



Bimtek dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dengan kegiatan bimtek ini pengalaman dan wawasan personil Inspektorat menjadi bertambah;

- terlaksananya pengiriman 1 orang Auditor mengikuti Diklat Certified Fraud Examiners (CFE);
- terlaksananya pengiriman 1 orang Auditor mengikuti Certified Forensik Auditor (CFrA).

Foto 3.2
Kegiatan Bimtek Audit Investigasi



- g) Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor, capaian kinerja berupa terlaksananya penilaian PAK dengan realisasi 9 orang.
- 4). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, meliputi kegiatan :
- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, dengan capaian kinerja berupa tersedianya data hasil evaluasi SAKIP dengan target 16 OPD dan terealisasi sebanyak 20 OPD.
 - b) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), capaian kinerja terpantaunya peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan target dan realisasi 48 OPD.
 - c) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, dengan capaian kinerja berupa:
 - tersedianya data laporan keuangan SKPD sesuai SAP dengan target 8 OPD terealisasi 16 OPD;
 - terlaksananya reuiu Rencana Kerja Angara (RKA) Tahun 2018 sebanyak 15 OPD.



- d) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen obyek pemeriksaan dan terlaksananya koordinasi pengawasan antar APIP dengan realisasi 10 dokumen, terlaksananya Koordinasi Pengawasan Nasional 1 (satu) kali, pelaksanaan penandatanganan Program Kerja Pengawasan Tahunan Provinsi dan 4 kali kegiatan Koordinasi Pengawasan Daerah (regional).

Foto 3.3

Penandatanganan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Antara Inspektorat Prov. Jateng dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Se-Jateng
Tahun 2018 di Karanganyar



- 5). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- a) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli, dengan capaian kinerja berupa :
- pembentukan Tim Saber Pungli;
 - melaksanakan kegiatan sosialisasi di semua sektor pelayanan;
 - melaksanakan laporan-laporan aduan ke sekretariat saber pungli untuk ditindaklanjuti;
 - melaksanakan inspeksi mendadak di berkurangnya pungutan liar di wilayah Kabupaten Temanggung.



Foto 3.4
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati Temanggung dengan
Kapolres Temanggung dan Forkopimda Kabupaten Temanggung



Foto 3.5
Rakor Tim Saber Pungli di Ruang Loka Bhakti Praja





Foto 3.6
Sosialisasi di samsat Temanggung



Adapun capaian kinerja atas pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Hasil Pemeriksaan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

TABEL 3.4
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Tahun	LHP	Jumlah		Tindak Lanjut					
			Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2013	125	1025	1025	707	68,98	286	0,28	41	0,40
2	2014	111	820	820	544	66,34	48	0,59	228	27,80
3	2015	176	1254	1254	947	75,52	27	2,15	280	22,33
4	2016	144	1043	1043	420	40,27	0	0	623	59,73
5	2017	185	884	890	542	60,89	348	39,10	0	0



TABEL 3.5
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah		Tindak Lanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2014	23	26	22	85	4	15	-	-
3	2015	59	95	55	58	40	42	-	-
4	2016	49	76	62	82	14	18	-	-
5	2017	8	12	0	0	12	100	-	-

TABEL 3.6
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah		Tindak Lanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2013	28	65	65	100	-	-	-	-
2	2014	22	82	75	91	7	9	-	-
3	2015	14	28	26	93	2	7	-	-
4	2016	20	82	70	85	12	15	-	-
5	2017	9	27	20	74	7	26	-	-

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, pada tahun anggaran 2017 di dukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD semula sebesar Rp1.545.223.000,00 (satu milyar limaratus empat puluh lima juta duaratus duapuluh tiga ribu rupiah) dan mendapatkan tambahan pada perubahan APBD 2017 sebesar Rp56.000.000,00 (limapuluh enam juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.601.223.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta duaratus duapuluh tiga ribu rupiah), anggaran tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran /program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2017

Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	1.498.300	99,89
	2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	55.000.000	51.460.606	93,56
		b. Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.500.000	1.494.000	99,60
		c. Penyediaan alat tulis kantor	26.000.000	25.992.050	99,97
		d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	21.999.925	100
		e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.500.000	1.492.500	99,50
		f. Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000	1.000.000	100
		g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	3.000.000	2.921.000	97,37
		h. Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000	35.549.400	79
		i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60.000.000	59.675.601	99,46



		j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	390.000.	165.000	42.31
		k. Jasa Pelayanan Perkantoran	13.200.000	13.192.000	99.94
	3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65.000.000	64.550.000	99.31
		b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	10.320.000	10.000.000	96.90
		c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.948.000	1.906.000	97.84
	4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	484.500.000	472.550.801	97.64
		b. PengeloLP2P dan LHKPN	24.840.000	24.829.950	99.96
		c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	48.104.000	44.991.878	93.53
		d. Pelaksanaan LARWASDA/Pe nyelesaian Tindak Lanjut	39.886.000	39.838.372	99.88
		e. Pengolahan Data Simwasda	11.686.000	11.436.000	97.86
		f. Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	136.997.000	132.992.301	97.08
		g. Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	64.916.000	63.369.743	97.62
	5. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	17.848.000	17.452.934	97.79



		b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17.628.000	17.362.188	98.49
		c. Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	67.460.000	65.271.238	96.76
		d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	130.000.000	129.570.073	99.67
Jumlah Anggaran Seluruhnya			1.601.223.000	1.555.063.320	

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila dibandingkan Tahun 2016 maka terjadi kenaikan sebesar 5.52 %, dimana pada Tahun 2017 sebesar 97,12% sedangkan untuk Tahun 2016 sebesar 91,60 % .



BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan capaian kinerja yang ada, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena capaian indikator Inspektorat pada sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis tersebut diukur berdasarkan Rumus Indikator Kinerja Daerah yaitu jumlah penanganan temuan dibagi jumlah temuan x 100 yang mana pengawasan dilakukan terhadap entitas setiap tahunnya. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 125 %, capaian indikator tersebut diukur berdasarkan realisasi sejumlah 884 temuan dengan rekomendasi sejumlah 890 rekomendasi sudah ditindaklanjuti sejumlah 890 rekomendasi dengan selesai 542 rekomendasi dan dalam proses sejumlah 348 rekomendasi, ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.



B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan pengawasan terhadap sistem keuangan daerah;
2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
4. Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kabupaten Temanggung;
5. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan;
6. Pelaksanaan SPIP di seluruh OPD Kabupaten Temanggung;
7. Pengintensifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Januari 2018.

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Ir. CUK SUGIARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jend. A.Yani No. 32 Telp. (0293) 492422 Kode Pos No. 56216

TEMANGGUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2017

Pihak Pertama,

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

Pihak Kedua,

BUPATI TEMANGGUNG

Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		
	a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.000.000	Sumber Dana APBD
	b. Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.500.000	Sumber Dana APBD
	c. Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000	Sumber Dana APBD
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000	Sumber Dana APBD
	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000	Sumber Dana APBD
	f. Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000	Sumber Dana APBD
	g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	Sumber Dana APBD
	h. Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	Sumber Dana APBD
	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60.000.000	Sumber Dana APBD
	j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.500.000	Sumber Dana APBD
	k. Jasa pelayanan perkantoran	13.200.000	Sumber Dana APBD
2.	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000	Sumber Dana APBD
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	10.320.000	Sumber Dana APBD
	c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.338.000	Sumber Dana APBD

3.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	450.000.000	Sumber Dana APBD
	b. Pengelolaan LP2P, HKSAN dan LHKPN	24.840.000	Sumber Dana APBD
	c. Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	50.604.000	Sumber Dana APBD
	d. Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tidak Lanjut	39.886.000	Sumber Dana APBD
	e. Pengolahan data Simwasda	11.686.000	Sumber Dana APBD
	f. Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	136.997.000	Sumber Dana APBD
	g. Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	64.916.000	Sumber Dana APBD
4.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	17.848.000	Sumber Dana APBD
	b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17.628.000	Sumber Dana APBD
	c. Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	67.460.000	Sumber Dana APBD
	d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	130.000.000	Sumber Dana APBD
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
	a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	250.000.000	Sumber Dana APBD
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
	a. Penyusunan dan Pelapcran Dokumen Perencanaan	1.500.000	Sumber Dana APBD
Jumlah seluruhnya		1.545.223.000	



Temanggung, Januari 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

[Signature]
I. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PD : INSPEKTORAT

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2019						Alokasi Anggaran 2018	Prakiraan Maju Thn 2020 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA TIDAK LANGSUNG							2.723.421.717	2.723.421.717	
A.	BELANJA PEGAWAI							2.723.421.717	2.723.421.717	2.723.421.717
1	Belanja pegawai							2.033.451.717	2.033.451.717	2.033.451.717
2	Tambahan Penghasilan PNS							689.970.000	689.970.000	689.970.000
	BELANJA LANGSUNG									
I.	PENGAWASAN							1.668.000.000	1.417.500.000	1.620.000.000
A.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah									
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terselenggaranya kegiatan program kerja Pengawasan Tahunan	Temanggung	-	140	LHP	550.000.000	DAU	547.000.000	620.000.000
2	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN	Temanggung	-	6.000	Lembar	25.000.000	DAU	25.000.000	25.000.000
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan RTP OPD, Evaluasi Pelaksanaan SPIP/RTP OPD Sampel dan Pembentukan Satgas SPIP OPD dan Kabupaten	Temanggung	-	10	OPD	50.000.000	DAU	50.000.000	50.000.000
4	Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Temanggung	-	625	Temuan	45.000.000	DAU	40.000.000	60.000.000
5	Pengolahan Data SIMWASDA	Tersedianya data Pengawasan yang akurat dan akuntabel	Temanggung	-	12	bulan	25.000.000	DAU	24.000.000	30.000.000
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Terselenggarakannya Kegiatan Evaluasi LKJIP SKPD	Temanggung	-	20	Unit Kerja/SKPD	25.000.000	DAU	25.000.000	40.000.000
7	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Terselenggarakannya kegiatan pendampingan dan Review Laporan Keuangan	Temanggung	-	8	Unit Kerja/SKPD	70.000.000	DAU	70.000.000	80.000.000
8	Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	Terselenggarakannya Kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan dan Rakor Pengawasan	Temanggung	-	10	Dokumen dan kegiatan	75.000.000	DAU	100.000.000	130.000.000
9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggarakannya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Temanggung	-	48	Dokumen	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000
B.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan									
1	Peningkatan sumber daya aparatur pengawas	Terlaksananya peningkatan SDM melalui BinteK, Sosialisasi, dan pelatihan	Temanggung	-	5	kali	170.000.000	DAU	170.000.000	170.000.000
2	Pengelolaan jabatan fungsional auditor	Terlaksananya pengelolaan JFA	Temanggung	-	13	orang	65.000.000	DAU	65.000.000	65.000.000
C.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum									
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	Terselenggaranya pelayanan publik bebas dari pungutan liar	Temanggung	-	12	bulan	250.000.000	DAU	278.000.000	275.000.000
2	Unit Pengendalian Gratifikasi	Terselenggaranya pelayanan publik bebas dari Gratifikasi			12	bulan	25.000.000	DAU		50.000.000

No	Uraian/Bidang Urutan Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2013					Alokasi Anggaran 2013	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Thn 2013	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Sumber Dana
II FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN										
A. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah										
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan SKPD (Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKJIP, dan LPPD)	Temanggung	-	8	Dokumen	5.000.000	DAU	3.500.000	5.000.000
III PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH										
A. Program pelayanan administrasi perkantoran										
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Temanggung	-	12	bulan	50.000.000	DAU	50.000.000	70.000.000
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	Temanggung	-	12	bulan	2.000.000	DAU	1.500.000	2.500.000
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Temanggung	-	12	bulan	20.000.000	DAU	16.000.000	25.000.000
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggarakannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	-	12	12	20.000.000	DAU	20.000.000	25.000.000
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Temanggung	-	12	bulan	1.000.000	DAU	1.000.000	1.500.000
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggarakannya pembelian peralatan rumah tangga						DAU	-	-
7.	Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Temanggung	-	12	bulan	3.000.000	DAU	2.700.000	3.000.000
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	Temanggung	-	12	bulan	30.000.000	DAU	30.000.000	45.000.000
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	Temanggung	-	12	bulan	50.000.000	DAU	50.000.000	65.000.000
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi						DAU		
11.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja	Temanggung	-	12	bulan	15.000.000	DAU	15.000.000	20.000.000
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Temanggung	-	8	unit	25.000.000	DAU	65.000.000	30.000.000
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Temanggung	-	11	paket	50.000.000	DAU	50.000.000	100.000.000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Temanggung	-	5	unit	2.000.000	DAU	2.000.000	2.500.000

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. CUK SUGIARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN II

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SP2D		3.847.480.129	404.493.375	4.251.973.504	4.251.973.504		
	Pengembalian Kas Daerah		1.400.000	32.275.900	33.675.900	33.675.900		
3.01.01.01.5	BELANJA DAERAH	4.352.794.739	3.843.897.047	374.400.557	4.218.297.604	134.497.135	3,09	
3.01.01.01.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.751.571.739	2.596.107.484	67.126.800	2.663.234.284	88.337.455	3,21	
3.01.01.01.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.751.571.739	2.596.107.484	67.126.800	2.663.234.284	88.337.455	3,21	
3.01.01.01.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.051.601.739	2.002.954.043		2.002.954.043	58.647.696	2,84	
3.01.01.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS Uang Representasi	1.524.918.228	1.479.915.000		1.479.915.000	45.003.228	2,95	
3.01.01.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	154.186.597	151.830.418		151.830.418	2.356.179	1,53	
3.01.01.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	136.391.625	129.285.000		129.285.000	7.106.625	5,21	
3.01.01.01.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	71.450.000	71.950.000		71.950.000	500.000	0,70	
3.01.01.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31.493.125	30.730.000		30.730.000	763.125	2,42	
3.01.01.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	92.194.281	89.800.800		89.800.800	2.393.481	2,60	
3.01.01.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.413.757	7.180.852		7.180.852	232.905	3,14	
3.01.01.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.693	20.299		20.299	394	1,90	
3.01.01.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.533.433	42.241.674		42.241.674	1.291.759	2,97	
3.01.01.01.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	689.970.000	593.153.441	67.126.800	660.280.241	29.689.759	4,30	
3.01.01.01.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	689.970.000	593.153.441	67.126.800	660.280.241	29.689.759	4,30	
3.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.601.223.000	1.247.789.563	307.273.757	1.555.063.320	46.159.680	2,88	
3.01.01.3.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.590.000	182.614.182	32.327.900	214.942.082	13.647.918	5,97	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TENANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman 1

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.000.000	45.795.905	5.663.700	51.460.606	3.539.394	6,44	
3.01.01.3.01.01.01.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	45.795.905	5.663.700	51.460.606	3.539.394	6,44	
3.01.01.3.01.01.01.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000	45.795.906	5.663.700	51.460.606	3.539.394	6,44	
3.01.01.3.01.01.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.800.000	2.858.000	2.275.000	5.133.000	1.667.000	24,51	
3.01.01.3.01.01.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.750.000	7.752.500	2.997.500	10.750.000			
3.01.01.3.01.01.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.200.000	30.182.731		30.182.731	17.269	0,06	
3.01.01.3.01.01.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.250.000	5.003.675	391.200	5.394.875	1.855.125	25,59	
3.01.01.3.01.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.500.000	1.398.800	95.200	1.494.000	6.000	0,40	
3.01.01.3.01.01.01.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	1.398.800	95.200	1.494.000	6.000	0,40	
3.01.01.3.01.01.01.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000	1.398.800	95.200	1.494.000	6.000	0,40	
3.01.01.3.01.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000	1.398.800	95.200	1.494.000	6.000	0,40	
3.01.01.3.01.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	26.000.000	15.125.250	7.866.800	25.992.050	7.950	0,03	
3.01.01.3.01.01.01.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000	15.125.250	7.866.800	25.992.050	7.950	0,03	
3.01.01.3.01.01.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000	15.125.250	7.866.800	25.992.050	7.950	0,03	
3.01.01.3.01.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23.663.300	15.179.500	7.483.800	23.663.300			
3.01.01.3.01.01.01.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.336.700	1.945.750	383.000	2.328.750	7.950	0,34	
3.01.01.3.01.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	18.504.725	3.495.200	21.999.925	75	0,00	
3.01.01.3.01.01.01.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000	18.504.725	3.495.200	21.999.925	75	0,00	
3.01.01.3.01.01.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000	18.504.725	3.495.200	21.999.925	75	0,00	

REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.185.000	8.610.000	2.575.000	11.185.000			
3.01.01.3.01.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.815.000	9.894.725	920.200	10.814.925	75	0,00	
3.01.01.3.01.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000	1.242.500	250.000	1.492.500	7.500	0,50	
3.01.01.3.01.01.01.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	1.242.500	250.000	1.492.500	7.500	0,50	
3.01.01.3.01.01.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000	1.242.500	250.000	1.492.500	7.500	0,50	
3.01.01.3.01.01.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.500.000	1.242.500	250.000	1.492.500	7.500	0,50	
3.01.01.3.01.01.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.01.014.5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.01.014.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.01.014.5.2.3.14.07	Belanja peralatan rumah tangga lainnya	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.721.000	200.000	2.921.000	79.000	2,63	
3.01.01.3.01.01.01.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000	1.825.000	200.000	2.025.000	75.000	3,57	
3.01.01.3.01.01.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000	1.825.000	200.000	2.025.000	75.000	3,57	
3.01.01.3.01.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.100.000	1.825.000	200.000	2.025.000	75.000	3,57	
3.01.01.3.01.01.01.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	900.000	896.000		896.000	4.000	0,44	
3.01.01.3.01.01.01.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	900.000	896.000		896.000	4.000	0,44	
3.01.01.3.01.01.01.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	900.000	896.000		896.000	4.000	0,44	
3.01.01.3.01.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000	26.894.900	8.654.500	35.549.400	9.450.600	21,00	
3.01.01.3.01.01.01.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000	26.894.900	8.654.500	35.549.400	9.450.600	21,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000	26.894.900	8.654.500	35.549.400	9.450.600	21,00	
3.01.01.3.01.01.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.312.500	8.847.000	2.004.000	10.851.000	4.461.500	29,14	
3.01.01.3.01.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.302.500	375.000	3.825.000	4.200.000	3.102.500	42,49	
3.01.01.3.01.01.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	22.385.000	17.672.900	2.825.500	20.498.400	1.886.600	8,43	
3.01.01.3.01.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000	55.785.601	3.890.000	59.675.601	324.399	0,54	
3.01.01.3.01.01.01.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	55.785.601	3.890.000	59.675.601	324.399	0,54	
3.01.01.3.01.01.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000	55.785.601	3.890.000	59.675.601	324.399	0,54	
3.01.01.3.01.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000	55.785.601	3.890.000	59.675.601	324.399	0,54	
3.01.01.3.01.01.01.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	390.000	165.000		165.000	225.000	57,69	
3.01.01.3.01.01.01.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	390.000	165.000		165.000	225.000	57,69	
3.01.01.3.01.01.01.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	390.000	165.000		165.000	225.000	57,69	
3.01.01.3.01.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	390.000	165.000		165.000	225.000	57,69	
3.01.01.3.01.01.01.01.021	Jasa Pelayanan perkantoran	13.200.000	10.979.500	2.212.500	13.192.000	8.000	0,06	
3.01.01.3.01.01.01.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000	10.384.000	2.212.500	12.596.500	3.500	0,03	
3.01.01.3.01.01.01.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	12.600.000	10.384.000	2.212.500	12.596.500	3.500	0,03	
3.01.01.3.01.01.01.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	12.600.000	10.384.000	2.212.500	12.596.500	3.500	0,03	
3.01.01.3.01.01.01.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000	595.500		595.500	4.500	0,75	
3.01.01.3.01.01.01.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	595.500		595.500	4.500	0,75	
3.01.01.3.01.01.01.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600.000	595.500		595.500	4.500	0,75	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77.268.000	45.506.000	30.950.000	76.456.000	812.000	1,05	
3.01.01.3.01.01.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65.000.000	34.050.000	30.500.000	64.550.000	450.000	0,69	
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	65.000.000	34.050.000	30.500.000	64.550.000	450.000	0,69	
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.500.000	10.300.000	5.000.000	15.300.000	200.000	1,29	
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	10.500.000	10.300.000		10.300.000	200.000	1,90	
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.11.18	Belanja modal papan nama petunjuk	5.000.000		5.000.000	5.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	25.500.000		25.500.000	25.500.000			
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	9.000.000		9.000.000	9.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.13.10	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	16.500.000		16.500.000	16.500.000			
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24.000.000	23.750.000		23.750.000	250.000	1,04	
3.01.01.3.01.01.01.02.007.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	24.000.000	23.750.000		23.750.000	250.000	1,04	
3.01.01.3.01.01.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.320.000	10.000.000		10.000.000	320.000	3,10	
3.01.01.3.01.01.01.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	10.320.000	10.000.000		10.000.000	320.000	3,10	
3.01.01.3.01.01.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.320.000	10.000.000		10.000.000	320.000	3,10	
3.01.01.3.01.01.01.02.009.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	10.320.000	10.000.000		10.000.000	320.000	3,10	
3.01.01.3.01.01.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.948.000	1.456.000	450.000	1.906.000	42.000	2,16	
3.01.01.3.01.01.01.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.948.000	1.456.000	450.000	1.906.000	42.000	2,16	
3.01.01.3.01.01.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.948.000	1.456.000	450.000	1.906.000	42.000	2,16	
3.01.01.3.01.01.01.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	1.948.000	1.456.000	450.000	1.906.000	42.000	2,16	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman 5

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.15	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	810.929.000	606.503.399	163.505.646	790.009.045	20.919.955	2,58	
3.01.01.3.01.01.01.15.007	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	484.500.000	361.297.201	111.253.600	472.550.801	11.949.199	2,47	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.230.000	1.230.000		1.230.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.230.000	1.230.000		1.230.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.230.000	1.230.000		1.230.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	483.270.000	360.057.201	111.253.600	471.320.801	11.949.199	2,47	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.682.000	4.142.000	1.520.000	5.662.000	20.000	0,35	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.682.000	4.142.000	1.520.000	5.662.000	20.000	0,35	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.860.000	4.197.500	669.600	4.857.100	2.900	0,06	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.860.000	4.197.500	669.600	4.857.100	2.900	0,06	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000	3.171.500	64.000	3.225.500	14.500	0,45	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.240.000	2.190.000	54.000	2.234.000	6.000	0,27	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000	991.500		991.500	8.500	0,85	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	469.488.000	348.555.201	109.020.000	457.576.201	11.911.799	2,54	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	456.270.000	335.420.000	109.020.000	444.440.000	11.830.000	2,59	
3.01.01.3.01.01.01.15.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.218.000	13.136.201		13.136.201	81.799	0,62	
3.01.01.3.01.01.01.15.008	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	24.840.000	24.829.950		24.829.950	10.050	0,04	
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.190.000	3.190.000		3.190.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.190.000	3.190.000		3.190.000			

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman

6

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.190.000	3.190.000		3.190.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.650.000	21.639.950		21.639.950	10.050	0,05	
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	200.000		200.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000	200.000		200.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.925.000	10.925.000		10.925.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.925.000	10.925.000		10.925.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000	405.000		405.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	405.000	405.000		405.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.120.000	10.109.950		10.109.950	10.050	0,10	
3.01.01.3.01.01.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.120.000	10.109.950		10.109.950	10.050	0,10	
3.01.01.3.01.01.01.15.009	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	48.104.000	17.205.878	27.786.000	44.991.878	3.112.122	6,47	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.390.000		12.190.000	12.190.000	200.000	1,61	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.390.000		12.190.000	12.190.000	200.000	1,61	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.390.000		12.190.000	12.190.000	200.000	1,61	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.714.000	17.205.878	15.596.000	32.801.878	2.912.122	8,15	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000		1.668.000	1.668.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.668.000		1.668.000	1.668.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.905.000		1.813.000	1.813.000	92.000	4,83	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000		465.000	465.000	35.000	7,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman 7

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000		1.100.000	1.100.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	305.000		248.000	248.000	57.000	18,69	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000		780.000	780.000	420.000	35,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000		780.000	780.000	420.000	35,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.041.000	7.617.800	5.415.000	13.032.800	8.200	0,06	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.236.000	1.827.800	400.000	2.227.800	8.200	0,37	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.805.000	5.790.000	5.015.000	10.805.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000	9.588.078	(80.000)	9.508.078	91.922	0,96	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.600.000	9.588.078	(80.000)	9.508.078	91.922	0,96	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	8.300.000		6.000.000	6.000.000	2.300.000	27,71	
3.01.01.3.01.01.01.15.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000		6.000.000	6.000.000	2.300.000	27,71	
3.01.01.3.01.01.01.15.010	Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut	39.886.000	38.249.372	1.589.000	39.838.372	47.628	0,12	
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000	450.000	225.000	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000	450.000	225.000	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000	450.000	225.000	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.211.000	37.799.372	1.364.000	39.163.372	47.628	0,12	
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.821.000	921.500	888.000	1.809.500	11.500	0,63	
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.821.000	921.500	888.000	1.809.500	11.500	0,63	
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000	262.900	476.000	738.900	1.100	0,15	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman 8

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000	262.900	476.000	738.900	1.100	0,15	
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000	1.620.000		1.620.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.620.000	1.620.000		1.620.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.030.000	34.994.972		34.994.972	35.028	0,10	
3.01.01.3.01.01.01.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.030.000	34.994.972		34.994.972	35.028	0,10	
3.01.01.3.01.01.01.15.012	Pengolahan Data Simwasda	11.686.000	6.283.500	5.152.500	11.436.000	250.000	2,14	
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360.000	360.000		360.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	360.000	360.000		360.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000	360.000		360.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.326.000	5.923.500	5.152.500	11.076.000	250.000	2,21	
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	481.000	481.000		481.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	481.000	481.000		481.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000		4.800.000	4.800.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.03.40	Belanja jasa pemeliharaan peralatan pengolahan data elektronik	4.800.000		4.800.000	4.800.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000	100.000		100.000	10.000	9,09	
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000	100.000		100.000	10.000	9,09	
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000	322.500	352.500	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000	322.500	352.500	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.260.000	5.020.000		5.020.000	240.000	4,56	

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.15.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.260.000	5.020.000		5.020.000	240.000	4,55	
3.01.01.3.01.01.01.15.013	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	136.997.000	99.497.755	33.494.545	132.992.301	4.004.699	2,92	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.020.000		1.020.000	1.020.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.020.000		1.020.000	1.020.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.020.000		1.020.000	1.020.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.977.000	99.497.755	32.474.545	131.972.301	4.004.699	2,95	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000	796.000	456.000	1.252.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.252.000	796.000	456.000	1.252.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000		990.000	990.000	240.000	19,51	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000		990.000	990.000	40.000	3,88	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000				200.000	100,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000	2.340.000		2.340.000	460.000	16,43	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000	2.340.000		2.340.000	460.000	16,43	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.030.000	3.690.000	2.855.000	6.545.000	2.485.000	27,52	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.260.000	400.000	860.000	1.260.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.770.000	3.290.000	1.995.000	5.285.000	2.485.000	31,98	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.940.000	33.765.333	13.173.546	46.938.879	1.121	0,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.940.000	33.765.333	13.173.546	46.938.879	1.121	0,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.000.000	9.000.000		9.000.000			

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000	9.000.000		9.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	65.725.000	49.906.422	15.000.000	64.906.422	818.578	1,25	
3.01.01.3.01.01.01.15.013.5.2.2.25.01	Belanja kepesertaan pegawai	65.725.000	49.906.422	15.000.000	64.906.422	818.578	1,25	
3.01.01.3.01.01.01.15.014	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	64.916.000	59.139.743	4.230.000	63.369.743	1.546.257	2,38	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.230.000		4.230.000	4.230.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.230.000		4.230.000	4.230.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.230.000		4.230.000	4.230.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.686.000	59.139.743		59.139.743	1.546.257	2,55	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.000	602.000		602.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	602.000	602.000		602.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	509.000	330.000		330.000	179.000	35,17	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	330.000	330.000		330.000			
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.05.03	Belanja Dokumentasi	179.000				179.000	100,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.995.000	997.500		997.500	997.500	50,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.995.000	997.500		997.500	997.500	50,00	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.580.000	57.210.243		57.210.243	369.757	0,64	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.580.000	57.210.243		57.210.243	369.757	0,64	
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis							
3.01.01.3.01.01.01.15.014.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan							

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.16	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	232.936.000	190.195.857	39.460.576	229.656.433	3.279.567	1,41	
3.01.01.3.01.01.01.16.003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.848.000	14.249.000	3.203.934	17.452.934	395.066	2,21	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000		675.000	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000		675.000	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000		675.000	675.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.173.000	14.249.000	2.528.934	16.777.934	395.066	2,30	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000	908.000		908.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	908.000	908.000		908.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000	1.932.000	200.000	2.132.000	68.000	3,09	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.05.01	Belanja cetak	1.400.000	1.152.000	200.000	1.352.000	48.000	3,43	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000	780.000		780.000	20.000	2,50	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.000	550.000		550.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	550.000	550.000		550.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.545.000	4.429.000		4.429.000	116.000	2,55	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	650.000	544.000		544.000	116.000	17,58	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.895.000	3.885.000		3.885.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.970.000	3.430.000	2.328.934	5.758.934	211.066	3,54	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.970.000	3.430.000	2.328.934	5.758.934	211.066	3,54	
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.000.000	3.000.000		3.000.000			

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.16.003.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000	3.000.000		3.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.008	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17.628.000	15.728.188	1.634.000	17.362.188	265.812	1,51	
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.550.000	3.550.000		3.550.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000	3.550.000		3.550.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000	3.550.000		3.550.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.078.000	12.178.188	1.634.000	13.812.188	265.812	1,89	
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	798.000	798.000		798.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	798.000	798.000		798.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000	215.250	544.000	759.250	750	0,10	
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760.000	215.250	544.000	759.250	750	0,10	
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000	1.425.000		1.425.000	195.000	12,04	
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000	1.425.000		1.425.000	195.000	12,04	
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000	9.739.938	1.090.000	10.829.938	70.062	0,64	
3.01.01.3.01.01.01.16.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.900.000	9.739.938	1.090.000	10.829.938	70.062	0,64	
3.01.01.3.01.01.01.16.010	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	67.460.000	51.377.238	3.894.000	65.271.238	2.188.762	3,24	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	540.000		540.000	540.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	540.000		540.000	540.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540.000		540.000	540.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.920.000	51.377.238	3.354.000	64.731.238	2.188.762	3,27	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	806.000	806.000		806.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	806.000	806.000		806.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.966.000	1.959.700		1.959.700	6.300	0,32	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	840.000	840.000		840.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000	803.700		803.700	6.300	0,78	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	316.000	316.000		316.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.229.000	17.725.000	504.000	18.229.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.229.000	17.725.000	504.000	18.229.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.367.500	8.746.450		8.746.450	621.050	6,63	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000	1.945.450		1.945.450	154.550	7,36	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.267.500	6.801.000		6.801.000	466.500	6,42	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.801.500	11.890.088	2.850.000	14.740.088	61.412	0,41	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.801.500	11.890.088	2.850.000	14.740.088	61.412	0,41	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	21.750.000	20.250.000		20.250.000	1.500.000	6,90	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.750.000	20.250.000		20.250.000	1.500.000	6,90	
3.01.01.3.01.01.01.16.011	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	130.000.000	98.841.431	30.728.642	129.570.073	429.927	0,33	
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	570.000	380.000	190.000	570.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	570.000	380.000	190.000	570.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570.000	380.000	190.000	570.000			

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman 1.

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	806.000	806.000		806.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	806.000	806.000		806.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.966.000	1.959.700		1.959.700	6.300	0,32	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	840.000	840.000		840.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000	803.700		803.700	6.300	0,78	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	316.000	316.000		316.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.229.000	17.725.000	504.000	18.229.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.229.000	17.725.000	504.000	18.229.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.367.500	8.746.450		8.746.450	621.050	6,63	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000	1.945.450		1.945.450	154.550	7,36	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.267.500	6.801.000		6.801.000	466.500	6,42	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.801.500	11.890.088	2.850.000	14.740.088	61.412	0,41	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.801.500	11.890.088	2.850.000	14.740.088	61.412	0,41	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	21.750.000	20.250.000		20.250.000	1.500.000	6,90	
3.01.01.3.01.01.01.16.010.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.750.000	20.250.000		20.250.000	1.500.000	6,90	
3.01.01.3.01.01.01.16.011	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	130.000.000	98.841.431	30.728.642	129.570.073	429.927	0,33	
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	570.000	380.000	190.000	570.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	570.000	380.000	190.000	570.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570.000	380.000	190.000	570.000			

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129.430.000	98.461.431	30.538.642	129.000.073	429.927	0,33	
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.136.000	600.000	536.000	1.136.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.136.000	600.000	536.000	1.136.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	994.000	348.000	634.000	982.000	12.000	1,21	
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250.000	98.000	140.000	238.000	12.000	4,80	
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	744.000	250.000	494.000	744.000			
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.300.000	97.513.431	29.368.642	126.882.073	417.927	0,33	
3.01.01.3.01.01.01.16.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	127.300.000	97.513.431	29.368.642	126.882.073	417.927	0,33	
3.01.01.3.01.01.01.17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	250.000.000	221.471.825	21.029.635	242.501.460	7.498.540	3,00	
3.01.01.3.01.01.01.17.001	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	250.000.000	221.471.825	21.029.635	242.501.460	7.498.540	3,00	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129.619.000	123.520.000	1.349.000	124.869.000	4.750.000	3,65	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.780.000	110.030.000		110.030.000	4.750.000	4,14	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.780.000	110.030.000		110.030.000	4.750.000	4,14	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS	14.839.000	13.490.000	1.349.000	14.839.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	14.839.000	13.490.000	1.349.000	14.839.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.381.000	91.951.825	19.680.635	111.632.460	2.748.540	2,40	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000	1.710.000		1.710.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.710.000	1.710.000		1.710.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000	3.000.000		3.000.000			

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman 11

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	3.000.000	3.000.000		3.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000	480.000	594.000	1.074.000	1.326.000	55,25	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000	480.000	594.000	1.074.000	1.326.000	55,25	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	561.000	152.025	50.675	202.700	358.300	63,87	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	561.000	152.025	50.675	202.700	358.300	63,87	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.620.000	809.950	3.806.960	4.616.910	3.090	0,07	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.620.000	809.950	3.806.960	4.616.910	3.090	0,07	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000	4.749.850	100.000	4.849.850	150	0,00	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.000.000	3.900.000	100.000	4.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000	849.850		849.850	150	0,02	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.710.000	27.520.000	15.129.000	42.649.000	1.061.000	2,43	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.710.000	367.500	398.000	765.500	944.500	55,23	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000	11.980.000	1.971.000	13.951.000	49.000	0,35	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.000.000	15.172.500	12.760.000	27.932.500	67.500	0,24	
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.080.000	14.080.000		14.080.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Jaket	14.080.000	14.080.000		14.080.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas							
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah							
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah							

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Halaman 16

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	39.450.000	39.450.000		39.450.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.450.000	39.450.000		39.450.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.3	BELANJA MODAL	6.000.000	6.000.000		6.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000	6.000.000		6.000.000			
3.01.01.3.01.01.01.17.001.5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	6.000.000	6.000.000		6.000.000			
3.01.02.3.01.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.500.000	1.498.300		1.498.300	1.700	0,11	
3.01.02.3.01.01.01.21.060	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	1.498.300		1.498.300	1.700	0,11	
3.01.02.3.01.01.01.21.060.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	1.498.300		1.498.300	1.700	0,11	
3.01.02.3.01.01.01.21.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000	849.000		849.000	1.000	0,12	
3.01.02.3.01.01.01.21.060.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	850.000	849.000		849.000	1.000	0,12	
3.01.02.3.01.01.01.21.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000	649.300		649.300	700	0,11	
3.01.02.3.01.01.01.21.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000	649.300		649.300	700	0,11	
	JUMLAH BELANJA	4.352.794.739	3.843.897.047	374.400.557	4.218.297.604	134.497.135	3,09	
	SALDO KAS		2.183.082	(2.183.082)				

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Kerja : 301010100-INSPEKTORAT

Nomor Pengesahan :

Bulan : 12

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Sekarang	Realisasi s.d. Sekarang	SISA ANGGARAN		Ket.
						Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengesahkan

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. CLK SUGIYARSO, MSI
 NIP : 19590913 198903 1 002

10 Januari 2018

Pejabat Penatausahaan Keuangan

HARNI MUNASIH, SE, MM
 NIP : 19740424 199603 2 002

LAMPIRAN III

LAPORAN EVALUASI RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2017

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2017 TRIWULAN IV

Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD

1. Prosentase Penyerapan Hasil Temuan Pemeriksaan

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2018)		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi per Triwulan Th. 2017								Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket.																			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (REKUA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27		28																		
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN																																														
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah					5.756.575		13.409.792	5	2.000.000	1.500.000	4	781.400			0	0	403.700	2	313.200	7	1.488.300	140	99,89	22	14.908.092	88	259	0																		
1	Perencanaan Dokumen dan Pelaporan SKPD	Terdapatnya dokumen perencanaan pelaksanaan SKPD (RKA, RKA, RKA, RPA, DPA, LAKP, dan LPPD)	dokumen	25	5.756.575	15	13.409.792	5	2.000.000	1.500.000	4	781.400	1		0	0	403.700	2	313.200	7	1.488.300	140	99,89	22	14.908.092	88	259	0																		
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		140	99,89																						
Predikat sangat tinggi																																														
2. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDUAN																																														
A Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemelihara dan Aparatur Pegawai					1.394.881.563		1.986.595.205		982.900.000	810.929.000		136.968.496		160.619.441		195.897.623		296.153.483		790.009.045	105	97,64		1.776.604.250	2.560	1.930	0																			
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkelanjutan	Tersedianya laporan hasil pengawasan	LHP	675	983.553.163	414	1.333.985.703	135	527.900.000	484.500.000	12	100.327.000	52	88.176.068	41	151.213.433	72	152.834.300	177	472.550.801	131	97,53	591	1.806.536.504	88	182																				
2	Pengelolaan LKIP dan LHKRN	Terselenggaranya kegiatan pembinaan LKIP, UKASIS dan LHKRN	kesib	30.000	46.585.000	18.000	82.895.000	6.000	45.000.000	24.840.000	0	0	5.000	11.834.950	1.000	12.995.000	0	0	6.000	24.829.950	100	99,96	24.000	107.724.950	80	231																				
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya Bireks dan Pembentukan kerja/SKP D	unit kerja/SKP D	5	150.000.000	36	138.425.896	8	60.000.000	48.104.000	0	0	6.186.500	0	0	8	36.435.378	8	41.591.878	100	93,53	104	183.417.774	1.080	122																					
4	Pelaksanaan LARWASDA, Penyelesaian Tindak Lanjut	Terselenggaranya Kegiatan Garur Pegawai Daerah dan Penyelesaian Tindak Lanjut	temuan	2.500	19.930.000	1.490	152.008.077	625	75.000.000	39.896.000	311	4.289.821	282	12.579.918	61	12.483.135	59	10.485.500	747	39.838.371	120	99,86	2.237	191.846.449	83	480																				
5	Pengolahan SIMWASDA	Tersedianya data Pengawasan yang akurat dan akribabel	data	36	57.000.000	12	22.066.044	12	100.000.000	11.686.000	3	0	3	2.210.000	3	1.263.500	3	7.362.500	12	11.436.000	100	97,86	24	33.502.044	67	59																				
6	Peningkatan sumber daya aparatur pegawai	Terselenggaranya kegiatan melalui Bimtek, sosialisasi, dan pelatihan	keu	20	39.815.000	12	133.812.505	4	100.000.000	138.997.000	0	1	32.823.422	1	35.868.020	2	64.300.859	4	132.992.301	100	97,08	16	246.304.800	80	445																					
7	Pengelolaan jabatan fungsional auditor	Terselenggaranya pengelolaan IFA	orang	55	47.916.000	33	123.901.980	11	75.000.000	64.916.000		12.351.675	0	6.808.585	9	2.074.535	0	22.134.948	9	63.369.743	82	97,62	42	187.271.723	76	391																				
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		105	97,64																						
Predikat sangat tinggi																																														
B Program pemetaan dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan					366.025.000		518.747.990		231.000.000	232.336.000		82.801.782		42.556.486		32.745.909		91.922.276		229.656.433	191	98,18	100,75	187.101.105,75	112,60	325,71																				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Hasil Kerja SKPD	Terselenggaranya kegiatan evaluasi UKP D	unit kerja/SKP D	80	68.550.000	56	48.062.111	16	21.000.000	17.848.000		1.750.000	20	10.567.000	0	1.952.000	0	3.203.934	20	17.452.934	125	97,79	76	65.515.045	95	98																				
2	Review dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan pendampingan dan review laporan keuangan, review REA, evaluasi LKIP	unit kerja/SKP D	40	53.240.000	40	110.904.435	8	85.000.000	67.460.000	16	12.158.688		0	0	6.492.550	15	26.620.000	31	65.271.238	388	96,76	71	176.175.673	178	335																				

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi per Triwulan Th. 2017								Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket.																						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (REKOA)	Rp (OPPA)	I		II		III		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																							
											12	13	14	15	16	17												18	19	20	21	22	23	24	25 (K+Rp)	26	27	28											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25 (K+Rp)	26	27	28																	
1.	Penyusunan Program Kerja Pemerintah Tahunan (PKPT) dan Koordinasi Pengawasan	Tersedianya dokumen obyektif perencanaan dan koordinasi pengawasan antar APP	dokumen	50	46.585.000	30	246.961.296	10	100.000.000	130.000.000	10	28.893.094	5	26.001.216	0	14.581.421	0	60.464.342	15	129.570.073	150	99,67	45	376.521.360	90	808																							
4.	Penilaian Maturity Pelaksana Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	dokumen	240	199.650.000	163	112.820.148	48	25.000.000	17.628.000		0	48	5.988.250	0	9.739.938	0	1.634.000	48	17.362.188	100	96,49	211	130.182.136	88	65																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					281	98,18																											
C. Program pelayanan administrasi pemerintahan																								199.998.643		579.927.663		263.300.000	228.990.000		36.701.794		35.611.010		68.072.594				214.942.081	1.100	1.011	564	794.869.645	940	92.631	0			
1.	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan kantor yang memerlukan benda-benda gen	bulan	60	5.796.575	36	9.218.035	12	3.100.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	36	9.218.035	60	160																							
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan benjin kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa servis kendaraan dinas, penggantian suku cadang, BBM dan STNE	bulan	60	732.050	36	154.136.885	12	65.500.000	93.000.000	3	9.253.834	3	11.185.817	3	20.858.884	3	10.182.031	12	51.480.808	100	91,56	48	205.597.491	80	28.085																							
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan	bulan	60	2.415.765	36	4.065.245	12	2.000.000	1.500.000	3	145.000	3	282.000	3	516.800	3	550.200	12	1.494.000	100	99,60	48	5.599.245	80	230																							
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	bulan	60	22.542.535	36	51.564.800	12	20.000.000	26.000.000	3	6.834.300	3	4.016.700	3	5.866.990	3	9.274.060	12	25.992.050	100	99,97	48	77.556.850	80	344																							
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penggandaan	bulan	60	25.768.160	36	54.239.050	12	18.000.000	22.000.000	3	4.576.850	3	3.990.176	3	4.260.500	3	7.172.400	12	21.999.925	100	100,00	48	76.234.975	80	236																							
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan	60	878.460	36	2.072.000	12	1.000.000	1.500.000	3	0	3	0	3	998.000	3	494.500	12	1.492.500	100	96,30	48	3.964.500	80	406																							
7.	Penyediaan peralatan ramaah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan ramaah tangga	bulan	60	798.600	36	3.142.700	12	1.500.000	1.000.000	3	0	3	0	3	1.000.000	3	0	12	1.000.000	100	100,00	48	4.142.700	80	519																							
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya referensi bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	60	2.928.200	36	6.850.600	12	3.000.000	3.000.000	3	630.000	3	560.000	3	1.328.000	3	405.000	12	2.921.000	100	97,37	48	9.771.600	80	334																							
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan, minum pegawai, rapat dan tamu	bulan	60	21.255.405	36	49.971.400	12	50.000.000	45.000.000	3	3.570.000	3	3.445.500	3	8.862.000	3	19.671.800	12	35.949.400	100	75,00	48	85.520.800	80	402																							
10.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi antar APP dan tugas pengawasan	bulan	60	4.658.300	36	2.626.975	12	85.000.000	60.000.000	3	11.691.750	3	10.150.778	3	18.368.420	3	18.264.653	12	59.675.601	100	99,46	48	61.302.576	80	1.337																							
11.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dengan DPRD/dalam pemerintahan di Kab. Tembung	bulan	60	96.292.393	36	206.362.873	12	3.000.000	390.000	3	0	3	0	3	165.000	3	165.000	12	165.000	100	42,31	48	207.127.873	80	215																							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2016		Target 2017				Realisasi per Triwulan Th. 2017								Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket.																		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENIA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K		Rp.																	
12	Jasa Perkantoran	Pelayanan Terselenggaranya penyelesaian tugas di luar jam kerja	bulan	60	15.972.000	36	35.081.000	12	11.200.000	11.200.000	3	0	3	0	3	5.815.000	3	7.377.000	12	13.192.000	100	95,94	48	48.273.000	80	302																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				1,00	1,010,71																							
Predikat sangat tinggi																				300	294,05																							
D. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					115.003.550		229.308.330		116.930.000	77.288.000		386.000		44.748.000		223.000				76.456.000	300	294	90	305.764.300	819	40.592																		
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	25	110.437.000	15	211.464.000	3	100.430.000	85.000.000		0	2	34.050.000	0	0	1	30.500.000	3	64.550.000	100	95,31	18	276.034.000	72	250																		
2.	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor	bulan	60	66.550	36	16.804.200	12	14.000.000	10.320.000	3	0	3	10.000.000	3	0	3	0	12	10.000.000	100	96,90	48	26.804.200	80	40.277																		
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	bulan	36	4.500.000	12	1.040.000	12	2.500.000	1.548.000	3	386.000	3	695.000	3	225.000	3	600.000	12	1.906.000	100	97,84	24	2.946.000	667	65																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				300	294,05																							
Predikat sangat tinggi																				0	0	0,00	0	13.409.792		2																		
E. Program Peningkatan disiplin aparatur					204.000.000		13.409.792		0	0		0		0					0	0	0,00	0	13.409.792		7																			
1.	Pengadaan pakaian dinas harian	Tersedianya pakaian dinas harian	orang	36	204.000.000	63	13.409.792		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	63	13.409.792		66	7																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	0,00																							
Predikat sangat tinggi																				0	0	0,00																						
F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					12.000.000		12.000.000		0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	12	12.000.000		100	100																		
1.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12	12.000.000		100	100																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	0,00																							
Predikat sangat tinggi																				100	97	12	242.501.460		50	24																		
G. Program Penyelenggaraan Pemeliharaan Umum					1.000.000.000		0		0	250.000.000		5.459.750		113.802.500		64.423.675				242.501.460	100	97	12	242.501.460		50	24																	
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas Dari Pungli	Terselenggaranya pelayanan publik bebas dari pungli	bulan	24	1.000.000.000		0		12	250.000.000	3	5.459.750	3	113.802.500	3	64.423.675	3	58.815.535	12	242.501.460	100	97,00	12	242.501.460		50	24																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	97,00																							
Predikat sangat tinggi																				123	282,91																							
Rata-rata Capaian Kinerja PD (%)																				123	282,91																							
Predikat sangat tinggi																				1.935	1.897,46	789	4.325.158.545		4.569	75.748																		
Jumlah					3.297.645.331		3.351.398.542		1.596.130.000	1.601.223.000		241.099.182		397.334.617		0	362.768.502	2	368.368.041	7	1.555.063.320	1.935	1.897,46	789	4.325.158.545	4.569	75.748																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan
 Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA

Temangrung, 3 Januari 2018
 INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN IV

- 1. OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016;**
- 2. KAPABILITAS APIP LEVEL 2;**
- 3. QA BPKP ATAS PELAKSANAAN MATURITAS SPIP KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km. 14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

Semarang, 30 Mei 2017

Nomor : 164 /S/XVIII.SMG/05/2017
Lampiran : Tiga berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Yth. Bupati Temanggung
Di
Temanggung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain terdapat pengelolaan Izin Reklame dan Pengendalian Reklame belum memadai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung agar menyusun Peraturan Bupati terkait perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame, teknis pelayanan penyelenggaraan reklame serta pengawasan reklame sesuai amanat peraturan daerah penyelenggaraan reklame.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain penentuan besaran Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung antara lain agar:

- a. Membuat survei sewa perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD oleh surveyor independen dengan mempertimbangkan standar yang berlaku;
- b. Merumuskan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan hasil survei tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menegur Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Temanggung karena lalai dalam merumuskan perhitungan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp877,20 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 60A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 60B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 60C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing bertanggal 23 Mei 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



M. Hery Subowo, SE., MPME, Ak., CA., CIA., CFE. 2
NIP 197105071991031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN HASIL PENJAMINAN
KUALITAS (QUALITY ASSURANCE) ATAS KAPABILITAS
APIP LEVEL II
PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : LAP-614/PW11/6/2017
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2017



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Raya Semarang - Kendal KM 12, Semarang 50186
Telepon (024) 8662203 (*Hunting*), Faksimile (024) 8662201
E-mail: jateng@bpkp.go.id

Nomor : LAP-614/PW11/6/2017 24 Agustus 2017
Lampiran : Satu set
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level II

Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung
di Temanggung

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi pengawasan intern yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, kami telah melakukan proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-886/PW11/6/2017 Tanggal 3 Agustus 2017. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penilaian mandiri tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka merumuskan program peningkatan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil kegiatan penjaminan kualitas kami sampaikan hasil sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung

Pada bulan Maret dan Mei 2017, Inspektorat Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan *workshop* peningkatan kapabilitas APIP yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu setelah *workshop* peningkatan kapabilitas APIP sampai dengan saat penjaminan kualitas kapabilitas pada bulan Agustus 2017, Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP. Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa dari enam elemen

yang dinilai secara keseluruhan berada pada posisi level 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut :

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri
1	Peran dan Layanan	Level 2
2	Pengelolaan SDM	Level 2
3	Praktik Profesional	Level 2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 2
6	Struktur Tata Kelola	Level 2
	Simpulan	Level 2

2. Informasi hasil validasi penjaminan kualitas

Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) level 2 (dua) kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dimulai dengan mendapatkan Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya Tim meminta dokumen infrastruktur pendukung/pemenuhan bukti-bukti untuk dilakukan validasi, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang sudah terimplementasi secara baik dan terus menerus (*institutionalized*)

Hal-hal yang sudah terimplementasi secara baik dan terus menerus pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1) Elemen I : Peran dan Layanan

Elemen tersebut sudah berada pada level 2 (dua) Hal tersebut ditunjukkan *Key Process Area* (KPA) yang sudah terbangun yaitu:

KPA – Audit Ketaatan, antara lain :

- a) Telah memiliki Piagam Audit Intern yang mencakup kegiatan pengawasan yang bersifat penjaminan/*assurance* dengan sasaran audit ketaatan;
- b) Telah memiliki pedoman/SOP tentang pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit; dan
- c) Telah menyusun PKPT berbasis prioritas manajemen/risiko dengan sasaran audit ketaatan;
- d) Membuat perencanaan penugasan pengawasan sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu (PKM);
- e) Telah memiliki pedoman tentang pemantauan tindak lanjut.

2) Elemen II: Pengelolaan SDM (*People Management*)

Elemen tersebut sudah berada pada level 2 (dua). Hal tersebut ditunjukkan dari *Key Process Area* (KPA) yang sudah terbangun yaitu:

a) KPA : Identifikasi dan Rekrutmen SDM yang Kompeten.

Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang telah ada dalam rangka membangun KPA tersebut, antara lain :

- (1) Telah memiliki peta kompetensi SDM yang memuat data pegawai serta kompetensinya.
- (2) Telah menyusun SOP Penyusunan Peta Kompetensi SDM
- (3) Telah memiliki kebijakan rekrutmen pegawai, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan penghitungan kebutuhan Auditor melalui aplikasi e-Formasi untuk selanjutnya dikirim ke BKD selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang;
- (4) Perekrutan pegawai dilakukan dengan pengusulan kebutuhan formasi jabatan fungsional auditor kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Temanggung.
- (5) Telah memiliki uraian jabatan; dan
- (6) Telah memiliki klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja APIP.

b) KPA : Pengembangan Profesi Individu

Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang telah ada dalam rangka membangun KPA tersebut, antara lain

- (1) Telah memiliki SOP Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- (2) Melaksanakan rencana pelatihan yang telah direncanakan; dan
- (3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan.

3) Elemen III: Praktik Profesional (*Professional Practices*)

Elemen tersebut sudah berada pada level 2 (dua). Hal tersebut ditunjukkan dari *Key Process Area* (KPA) yang sudah terbangun yaitu:

KPA: Perencanaan Pengawasan berdasarkan Prioritas Manajemen/ Pemangku Kepentingan.

Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang telah ada dalam rangka membangun KPA tersebut, antara lain :

- (1) Telah memiliki SOP Penyusunan PKPT

- (2) Telah menyusun PKPT dengan mempertimbangkan prioritas manajemen.
- (3) Telah mendokumentasikan seluruh proses penyusunan PKPT
- (4) PKPT yang disusun telah mempertimbangkan SDM dan anggaran; dan
- (5) PKPT telah disetujui oleh Kepala Daerah (Bupati).

4) Elemen IV: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)

Elemen tersebut sudah berada pada level 2 (dua). Hal tersebut dapat ditunjukkan dari *Key Process Area* (KPA) yang sudah terbangun, yaitu:

a) KPA : Perencanaan Kegiatan APIP

Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi KPA tersebut antara lain:

- (1) Telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
- (2) RKT telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah (Bupati).

b) KPA : Anggaran Operasional Kegiatan APIP

Infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan yang telah dimiliki dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung, yaitu :

- (1) Telah memiliki sistem dan proses penyusunan anggaran yang terstruktur; dan
- (2) Menyusun anggaran operasional sesuai dengan kegiatan dan sumber daya yang telah diidentifikasi dalam RKT.

5) Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationships and Culture*)

Pada Elemen tersebut sudah berada pada level 2 (dua). Hal tersebut dapat ditunjukkan dari *Key Process Area* (KPA) Pengelolaan Organisasi APIP yang sudah terbangun, antara lain:

- (1) Telah memiliki struktur organisasi yang disetujui secara formal dimana APIP secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah;
- (2) Telah memiliki uraian jabatan; dan

(3) Telah memiliki kebijakan untuk penyelenggaraan komunikasi internal APIP.

6) Elemen VI: Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Elemen tersebut sudah berada pada level 2 (dua). Hal tersebut dapat ditunjukkan dari *Key Process Area* (KPA) yang sudah terbangun, yaitu:

a) KPA : Hubungan Pelaporan Telah Terbangun

Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka membangun KPA tersebut antara lain :

(1) Memiliki Piagam Audit Intern yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP yang disetujui dan disahkan oleh Pimpinan Daerah (Bupati);

(2) Telah menyusun laporan kegiatan organisasi termasuk laporan hasil pengawasan untuk memenuhi tanggung jawab kepada Pimpinan Daerah (Bupati); dan

(3) Telah memiliki SOP mengenai penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan kepada Pimpinan Daerah (Bupati).

b) KPA : Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang telah diimplementasikan dalam rangka mendukung KPA tersebut adalah Piagam Audit Intern telah mencakup kewenangan APIP untuk dapat mengakses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

b. Hal-hal yang mulai diimplementasikan (*In Progress*)

Hal-hal yang mulai diimplementasikan oleh Inpektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1) Elemen I : Peran dan Layanan

a) Pada Elemen Peran dan Layanan, sudah berada pada level 2 (dua). Namun demikian sudah terdapat infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang mulai diimplementasikan dalam membangun KPA – Audit Ketaatan ;

(1) Melaksanakan penugasan pengawasan dalam hal ini mendokumentasikan pelaksanaan prosedur kerja dan hasilnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu (PKM);

- (2) Kertas Kerja yang disusun mengacu pada program kerja yang telah dibuat dan disusun secara sistematis sesuai urutan PKA serta direviu secara berjenjang pada penugasan- penugasan berikutnya.
- (3) Setiap penugasan yang akan datang agar program kerja audit menjadi referensi prosedur pelaksanaan dan penyusunan KKA.
- (4) Penyelenggaraan sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, berjalan secara berkelanjutan sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Temanggung masih secara manual dalam memantau tindak lanjut hasil pengawasan;

2) Elemen II: Pengelolaan SDM (*People Management*)

Pada elemen Pengelolaan SDM, masih ada infrastruktur dan aktivitas yang baru diimplementasikan dalam membangun KPA – Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten, yaitu penetapan kebutuhan formasi jabatan.

3) Elemen III: Praktik Profesional (*Professional Practices*)

Pada elemen Praktik Profesional, infrastruktur dan aktivitas yang baru diimplementasikan dalam KPA - Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Prosesnya :

- a) Telah memiliki Piagam Audit Intern yang memuat definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit; dan
- b) Memberlakukan Pedoman Kendali Mutu Audit.
- c) Memberlakukan kebijakan telaah sejawat.

4) Elemen IV: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)

Pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja, infrastruktur dan aktivitas yang baru diimplementasikan dalam membangun KPA- Anggaran Operasional Kegiatan APIP adalah melaksanakan kegiatan reviu anggaran operasional untuk memastikan bahwa anggaran telah realistis dan akurat namun belum dilaksanakan secara periodik.

5) Elemen V: Budaya dan Hubungan Organisasi

5) Elemen V: Budaya dan Hubungan Organisasi

Infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan pada elemen budaya dan hubungan organisasi yang masih harus disusun maupun dilaksanakan untuk membangun KPA – Pengelolaan organisasi APIP.

- a) Memastikan pemahaman OPD mengenai IAC.
- b) LHPS tahun 2016 dan 2017 disampaikan kepada pihak terkait sesuai ketentuan

6) Elemen VI : Struktur Tata Kelola

Pada elemen struktur tata kelola, infrastruktur dan aktivitas yang baru diimplementasikan dalam membangun KPA sebagai berikut :

- a) KPA-Hubungan Pelaporan Telah Terbangun, yaitu mengkomunikasikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP dalam Piagam Audit Intern ke seluruh organisasi melalui portal Temanggungkab.go.id.
- b) KPA-Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan Sumber Daya, yaitu:
 - (1) Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai kewenangan APIP untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas seluruh catatan, aset, dan pegawai auditan.
 - (2) Membuat uraian tugas wewenang dan tanggungjawab Irban I, II, III dan IV secara jelas dan spesifik untuk masing-masing Irban dalam rangka optimalkan peran SDM dalam melaksanakan tupoksi Inspektorat.
 - (3) Mengkaji dan merevisi bagan struktur JFA supaya berada dalam kendali Inspektur.

3. **Simpulan**

Sesuai hasil evaluasi/penjaminan kualitas sebagaimana diuraikan di atas, tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tahun 2017 menunjukkan bahwa dari enam elemen yang dinilai secara keseluruhan berada pada posisi level 2 (dua) yaitu dari enam elemen yang dinilai secara keseluruhan sebanyak 6 elemen berada pada posisi level 2 (dua) penuh dengan rincian sebagai berikut :

No	Elemen	Hasil <i>reassessment</i>
1	Peran dan Layanan	Level 2
2	Pengelolaan SDM	Level 2
3	Praktik Profesional	Level 2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 2
6	Struktur Tata Kelola	Level 2
	Simpulan	Level 2

4. Hal-hal Lain Terkait Kapabilitas APIP

Dari hasil wawancara dengan pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai mitra kerja, APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan pengawasannya secara profesional dengan sumber daya manusia yang kompeten.

5. Saran

Kepada Inspektur Kabupaten Temanggung kami sarankan untuk meningkatkan kualitas pada level 2 dan membangun/menyusun infrastruktur pada level 3 dengan cara membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) Penerapan Kapabilitas APIP Level 2 dan Level 3, sebagai berikut:

- a. Melanjutkan hal-hal yang mulai diimplementasikan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan audit dan mendokumentasikannya (KKP) sesuai standar audit dan PKM.
 - 2) Menyusun kebutuhan formasi jabatan.
 - 3) Mereviu anggaran operasional untuk memastikan kecukupannya.
 - 4) Melakukan survey kepuasan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Inspektorat sesuai laporan/ILHPS yang telah disampaikan.
- b. Rencana Tindak (*Action Plan*) dapat berjalan dengan efektif diperlukan:
 - 1) Komitmen Kepala Daerah terhadap kewenangan Inspektorat Kabupaten Temanggung.
 - 2) Komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP seiring dengan peran APIP yang semakin strategis dan penting.
 - 3) Dukungan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain: Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda dan DPPKAD Kabupaten Temanggung.

Untuk dapat melengkapi persyaratan kapabilitasnya menuju Level 3, Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat menggunakan rujukan dari Peraturan Kepala BPKP Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah...



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting), Faksimile 021-85910302

Nomor : S-2599/D3/01/2017

20 Desember 2017

Hal : Akselerasi Peningkatan Kapabilitas APIP
Kabupaten/Kota

Yth. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia
di Tempat

Sehubungan dengan target Level 3 Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota dalam RPJMN 2015-2019 dan mengingat masih rendahnya capaian Level 3 Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Kapabilitas APIP

Capaian Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota sampai dengan 19 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Capaian Kapabilitas APIP	Jumlah APIP Kabupaten/Kota
1	Level 1	171
2	Level 2	310
3	Level 3	27
	Total	508

Di samping Capaian Kapabilitas APIP di atas, kami sedang melakukan Reviu atas *Quality Assurance* (QA) terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada 72 APIP. Rincian APIP yang telah mencapai Level 3 dan dalam proses Reviu atas QA Kapabilitas Level 3 sebagaimana terlampir.

2. Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP

Komitmen dan dukungan Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu komponen utama bagi APIP dalam melakukan perbaikan proses bisnis dan peningkatan kapabilitas. Dalam rangka percepatan pencapaian peningkatan kapabilitas APIP sesuai target dalam RPJMN, Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu:

- a. Memperkuat komitmen dan dukungan dalam pemberdayaan APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan

SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.

- b. Mewajibkan semua unit kerja untuk menerapkan Penilaian Risiko sebagai penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008, mencakup identifikasi, analisis dan mitigasi risiko. Hasil penilaian risiko memberikan informasi penting bagi APIP dalam melakukan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- c. Melibatkan Pimpinan APIP dalam rapat-rapat strategis Kabupaten/Kota sehingga APIP mendapatkan gambaran terkait isu penting manajemen.

d. Mengoptimalkan peran jajaran manajemen yang bertugas untuk mereviu, menilai dan mengawasi kinerja APIP (*management oversight*). Pengawasan oleh jajaran manajemen ini diharapkan memberikan umpan balik dan arahan bagi APIP untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas manajemen Kabupaten/Kota.


e. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten/Kota untuk:

- 1) Mendorong pengembangan profesionalisme auditor/pejabat fungsional lain yang melakukan pengawasan melalui keikutsertaan dalam diklat teknis substantif, antara lain diklat audit PBJ, audit kinerja, SPIP, Manajemen Risiko, dan diklat terkait tata kelola pemerintahan yang baik (GG).
- 2) Mendorong dan memfasilitasi auditor di unit kerjanya untuk mengikuti sertifikasi profesional antara lain sertifikasi profesi CIA, QIA, CGAP, CRMA, CRMP dan/atau CCSA.
- 3) Melaksanakan program pengembangan dan penjaminan kualitas (*quality assurance and improvement program*) dalam bentuk:
 - a) Reviu berjenjang dalam setiap kegiatan pengawasan dengan merujuk pada Pedoman Kendali Mutu sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - b) Reviu internal secara periodik (pada setiap awal semester) dengan menunjuk tim tersendiri atau dalam bentuk telaah sejawat antar Inspektorat Wilayah/Inspektorat Pembantu/Inspektorat. Pelaksanaan reviu internal tersebut dapat merujuk pada Pedoman Telaah Sejawat yang diterbitkan AAPI.

- c) Reviu eksternal dalam bentuk telaah sejawat antar APIP. Untuk itu, APIP perlu berkoordinasi dengan AAIP, BPKP, dan APIP lain dalam pelaksanaan Telaah Sejawat antar APIP tersebut.
- 4) Menyusun pedoman dan melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko. Risiko tersebut diperoleh dari hasil penilaian risiko unit kerja.
 - 5) Melaksanakan audit kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E).
 - 6) Memberikan layanan konsultasi terhadap area-area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern (*governance, risk and control – GRC*) yang memerlukan perbaikan.
 - 7) Mereviu dan memutakhirkan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) secara berkala sesuai kebutuhan kapabilitas APIP.
 - 8) Menyusun profil sumber daya manusia yang meliputi jabatan, latar belakang pendidikan, dan kompetensi (sertifikasi dan diklat).
 - 9) Mengunggah *Internal Audit Charter*, jenis layanan, profil SDM Inspektorat ke dalam situs Inspektorat.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,



Gatot Darmasto

NIP 19591121 198503 1 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan).
2. Para Inspektur Kabupaten/Kota.

**RINCIAN APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS LEVEL 3
DAN DALAM PROSES REVIU ATAS QA KAPABILITAS LEVEL 3**

No	Nama APIP
A	APIP dengan Kapabilitas Level 3 DC
1	Inspektorat Kota Banda Aceh
2	Inspektorat Kota Langsa
3	Inspektorat Kabupaten Agam
4	Inspektorat Kabupaten Solok
5	Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
6	Inspektorat Kabupaten Lahat
7	Inspektorat Kabupaten Bangka
8	Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah
9	Inspektorat Kabupaten Wonogiri
10	Inspektorat Kabupaten Kudus
11	Inspektorat Kota Surakarta
12	Inspektorat Kabupaten Gianyar
13	Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
14	Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
15	Inspektorat Kabupaten Banjar
16	Inspektorat Kota Banjarmasin
17	Inspektorat Kota Samarinda
18	Inspektorat Kabupaten Boalemo
19	Inspektorat Kota Gorontalo
20	Inspektorat Kabupaten Pinrang
21	Inspektorat Kota Makassar
22	Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
23	Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara
24	Inspektorat Kota Tidore Kepulauan
25	Inspektorat Kota Ternate
26	Inspektorat Kabupaten Sorong
27	Inspektorat Kabupaten Pekalongan
B	APIP DALAM PROSES REVIU ATAS QA KAPABILITAS LEVEL 3
1	Inspektorat Kabupaten Aceh Barat
2	Inspektorat Kabupaten Bantul
3	Inspektorat Kabupaten Banyuasin
4	Inspektorat Kabupaten Banyumas
5	Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
6	Inspektorat Kabupaten Blora
7	Inspektorat Kabupaten Boyolali
8	Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
9	Inspektorat Kabupaten Flores Timur
10	Inspektorat Kabupaten Garut
11	Inspektorat Kabupaten Gorontalo
12	Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul

No	Nama APIP
13	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
14	Inspektorat Kabupaten Jepara
15	Inspektorat Kabupaten Karanganyar
16	Inspektorat Kabupaten Karimun
17	Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur
18	Inspektorat Kabupaten Kubu Raya
19	Inspektorat Kabupaten Kuningan
20	Inspektorat Kabupaten Landak
21	Inspektorat Kabupaten Majene
22	Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
23	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat
24	Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur
25	Inspektorat Kabupaten Muara Enim
26	Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
27	Inspektorat Kabupaten Nagekeo
28	Inspektorat Kabupaten Ngada
29	Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir
30	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
31	Inspektorat Kabupaten Pahuwato
32	Inspektorat Kabupaten Pandeglang
33	Inspektorat Kabupaten Paniai
34	Inspektorat Kabupaten Pati
35	Inspektorat Kabupaten Grobogan
36	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
37	Inspektorat Kabupaten Pringsewu
38	Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu
39	Inspektorat Kota Sawahlunto
40	Inspektorat Kabupaten Serang
41	Inspektorat Kabupaten Siak
42	Inspektorat Kabupaten Sikka
43	Inspektorat Kabupaten Sintang
44	Inspektorat Kabupaten Sumba Timur
45	Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
46	Inspektorat Kabupaten Sumedang
47	Inspektorat Kabupaten Talaud
48	Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
49	Inspektorat Kabupaten Tebo
50	Inspektorat Kabupaten Temanggung
51	Inspektorat Kabupaten Way Kanan
52	Inspektorat Kota Ambon
53	Inspektorat Kota Balikpapan
54	Inspektorat Kota Bandar Lampung
55	Inspektorat Kota Bontang
56	Inspektorat Kota Bukittinggi
57	Inspektorat Kota Depok
58	Inspektorat Kota Jambi
59	Inspektorat Kota Mataram
60	Inspektorat Kota Metro
61	Inspektorat Kota Padang

No	Nama APIP
62	Inspektorat Kota Pariaman
63	Inspektorat Kota Pontianak
64	Inspektorat Kota Singkawang
65	Inspektorat Kota Tangerang
66	Inspektorat Kota Tanjung Pinang
67	Inspektorat Kota Tomohon
68	Inspektorat Kabupaten Gayo Lues
69	Inspektorat Kabupaten Fakfak
70	Inspektorat Kabupaten Bondowoso
71	Inspektorat Kota Binjai
72	Inspektorat Kota Bekasi

DC: Dengan Catatan

BERITA ACARA HASIL *QUALITY ASSURANCE* (QA) PENILAIAN MATURITAS LEVEL SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 November 2017 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pembahasan hasil kegiatan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Temanggung dengan hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian terhadap Pedoman

Tingkat Kesesuaian Penilaian Maturitas SPIP yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017 dengan Surat tugas nomor 094/046/2017 tanggal 2 Oktober 2017 **Sesuai** dengan Pedoman Penilaian Maturitas SPIP dengan rata-rata nilai 79,81% sebagai berikut:

Tahap	Kesesuai dengan Standar
Persiapan	90,21%
Penilaian Pendahuluan Tingkat Maturitas SPIP	100,00%
Pengujian Bukti Maturitas SPIP	65,52%
Penyusunan Laporan Penilaian	77,78%
Rata-Rata Skor	79,81%

2. Skor Penilaian SPIP

Skor akhir hasil penilaian pendahuluan : 2,003

Skor akhir hasil penilaian menurut tim Assessor : 3,135

Skor akhir hasil penilaian menurut tim QA : 3,045

Alasan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Tim Assessor,

1. Endang Sriwahyuningih



2. Maria Puri Endrawati




Tim Penjaminan Kualitas,

1. Iwan Suhardi



2. Retno Hernaniningrum



3. Lita Chandra



4. Sulistyowati



Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Kabupaten : Temanggung

Tahun : 2017

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot		Ref	Keterangan
Penyusunan	90,21%	20,00%	18,04%	KKA-P1	
Penilaian Pendahuluan Tingkat Maturitas SPIP	100,00%	20,00%	20,00%	KKA-P2	
Pengujian Bukti Maturitas SPIP	65,52%	40,00%	26,21%	KKA-P2	
Penyusunan Laporan Penilaian	77,78%	20,00%	15,56%	KKA-P3	
Rata-Rata Skor			79,81%		Sesuai

	Skor Asesor	SKOR QA	Δ
Skor Maturitas	3,135	3,045	-0,090
Keunggulan Pengendalian	3,125	3,000	-0,125
Penilaian Risiko	3,000	3,000	0,000
Efektivitas Pengendalian	3,091	3,182	0,091
Informasi dan Komunikasi	3,000	3,000	0,000
Pemantauan dan Evaluasi	3,500	3,000	-0,500

	2017	2016	2015	2014
Nilai Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP		CC	C	C
Nilai Evaluasi RB		69,38	66,68	58,07

**Lampiran Berita Acara
Penjaminan Kualitas
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Kabupaten: Temanggung**

1	2	3	4	5	6	7	8
Indikator	Sub Unsur	Bobot	Skor Penilaian Pendahuluan*	Skor menurut Assessor	Kelengkapan Bukti	Skor menurut QA	Keterangan
	Kepengawasan Pengendalian	30%	3,125	3,125		3,000	
	Penegakan Integritas dan Etika		3,00	3	73,33%	3	-
	Komitmen thd Kompetensi		3,00	2	38,89%	1	Standar kompetensi masih berupa draft
	Kepemimpinan yg kondusif		4,00	4	80,00%	4	-
	Struktur organisasi sesuai kebutuhan		4,00	4	81,82%	4	-
	Delegasi wewenang & tanggung jwb		4,00	3	85,71%	3	-
	Kebijakan pembinaan SDM		4,00	3	72,22%	3	-
	Peran APIP yang efektif		1,00	3	64,29%	3	-
	Hubungan kerja yg baik		2,00	3	75,00%	3	-
	Penilaian Risiko	20%	-	3,000		3,000	
	Identifikasi Risiko		-	3	76,47%	3	-
	Analisis Risiko		-	3	58,82%	3	-
	Kegiatan Pengendalian	25%	3,364	3,091		3,182	
	Reviu kinerja		4,00	4	66,67%	4	-
	Pembinaan SDM		1,00	3	54,55%	3	-
	Pengendalian Sistem Informasi		-	3	57,14%	3	-
	Pengendalian fisik aset		5,00	3	70,00%	4	5 kali WTP, th 2016 tanpa catatan
	Penetapan & rivi indikator		5,00	3	75,00%	3	-
	Pemisahan fungsi		4,00	3	66,67%	3	-
	Otorisasi		4,00	3	57,14%	3	-
	Pencatatan		4,00	3	42,86%	3	-
	Pembatasan akses		5,00	3	57,14%	3	-
	Akuntabilitas		4,00	3	50,00%	3	-
	Dokumentasi SPI		1,00	3	66,67%	3	-
	Informasi & Komunikasi	10%	-	3,000		3,000	
	Informasi		-	3	62,50%	3	-
	Komunikasi Efektif		-	3	77,27%	3	-
	Pemantauan	15%	1,500	3,500		3,000	
	Pemantauan berkelanjutan		3,00	3	62,50%	3	-
	Evaluasi terpisah		-	4	65,38%	3	-
			Survai Pendahuluan	Menurut Assessor	Kelengkapan Bukti	Menurut QA	
	Skor SPIP		2,003	3,135	65,52%	3,045	